



BEA SISWA TITIPAN PARTAI

Anggota Dewan: Itu bukan titipan, melainkan aspirasi masyarakat.

Erwan Hermawan

erwan.hermawan@tempo.co.id

Lagi-lagi, Kartu Jakarta Pintar bermasalah. Sama seperti 2013, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan beasiswa untuk siswa dari keluarga miskin ini dimanfaatkan oleh mereka yang tak berhak, bahkan menjadi alat politik partai.

Dalam audit yang dipublikasikan pekan ini, BPK memberi catatan bahwa Dinas Pendidikan langsung menerima "siswa titipan" tersebut tanpa meminta sekolah memverifikasinya. "Ada penerima Kartu yang tidak diusulkan sesuai mekanisme," demikian bunyi laporan BPK.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Lasro Marbun, yang mengonsep Kartu Pintar sejak awal,

Beasiswa Siswa Miskin

Anggaran Kartu Jakarta Pintar naik setiap tahun. Pada 2014, pemerintah DKI menggelontorkan sekitar Rp 700 miliar untuk program bantuan siswa miskin ini. Tahun ini, anggarannya melonjak hampir empat kali lipat, yakni sebesar Rp 2,3 triliun.

Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Arie Budhiman mengatakan uang yang diterima siswa

mengakui beberapa partai "menitip pesan" agar mendapatkan beasiswa tersebut. Dinas, kata dia, tak bisa menolak permintaan itu.

Untuk mengurangi peluang salah transfer, kata Lasro, Dinas meminta sekolah menyeleksi siswa dan hanya menerima mereka yang memenuhi syarat. "Kalau tak sesuai, tak disetujui," kata dia kemarin.

Karena itu, Lasro menyangkal tuduhan Badan Pemeriksa bahwa sekolah tak memverifikasi ulang kelayakan siswa titipan partai tersebut. Sekolah, kata dia, berkali-kali mengecek data siswa tersebut hingga ke rumahnya. "Tahun ini tidak *ujuk-ujuk* muncul seperti tahun lalu," kata Lasro, yang kini menjabat Kepala Inspektorat Jenderal Pemerintah

akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Contohnya, siswa miskin di sekolah dasar, pada 2013, cuma menerima Rp 180 ribu per bulan, tahun ini akan ditambah menjadi Rp 240 ribu.

Pencairan tahap pertama Kartu Pintar 2015 telah dilakukan pada Juni lalu. Bank DKI telah menyalurkan dana sebesar Rp 1,9 triliun untuk dialokasikan bagi 489.150 siswa.

Provinsi Jakarta.

Ketua Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pantas Nainggolan, mempertanyakan istilah "titipan" itu. Menurut dia, siswa yang diajukan partai bukan titipan, melainkan aspirasi masyarakat langsung. "Masyarakat tidak bisa menyampaikannya, kami bantu," katanya.

Selain siswa titipan partai, dalam laporannya, BPK menyebutkan penyaluran beasiswa ini dobel karena ada 1.848 rekening senilai Rp 2,3 miliar yang dimiliki orang yang sama. BPK mencontohkan, ada siswa pindah sekolah mendapat rekening baru kendati masih menerima beasiswa dari sekolah lama.

Menurut Lasro, jika benar jumlah rekening ganda tak sampai 2.000, hal itu merupakan kemajuan karena pada tahun sebelumnya masih sebanyak 35 ribu. "Apa yang dilakukan kami sungguh luar biasa,"

ujarnya. Kalau masih ada rekening ganda, ia meminta Dinas memperbaikinya lagi.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Zulfarshah mengatakan bank hanya menerbitkan rekening berdasarkan data yang dipasok Dinas Pendidikan. "Kami hanya menyalurkan saja," katanya. Soal verifikasi penerima, kata dia, sepenuhnya kewenangan Dinas.

Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman berjanji memperbaiki sistem penerimaan Kartu Jakarta Pintar agar tak terjadi lagi penyaluran ganda. Cara yang akan dia tempuh adalah mewajibkan calon penerima menyertakan nomor induk kependudukan. Untuk itu, ia akan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencegah satu nama mendapat dua atau lebih rekening penerima beasiswa.

Menurut Arie, tahun ini proses validasi penerima Kartu Pintar jauh lebih ketat. Wali kelas, ujar dia, wajib mengunjungi rumah calon penerima dan mendatanya untuk disesuaikan dengan kriteria. Tak seperti sebelumnya, yang cukup menyerahkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. "Sekarang semuanya kami cek," ucap dia. ●